

PENGARUH BANTUAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM (STUDI KASUS UMKM DI KOTA PONTIANAK)

Udin Rinaldi, Ana Yuliana

STIE Indonesia Pontianak

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:Received : November, 13th 2021Revised : Desember 27th 2021Accepted : January, 9th 2022**Keywords:**

bank credit, financing, MSME, business development

Kata Kunci:

kredit perbankan, pembiayaan, UMKM, perkembangan usaha

ABSTRACT

The research objective is to analyze the development of bank credit towards the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) case studies in Pontianak City. Explanatory research aimed at discussing hypotheses and in accordance with research objectives. Provision of bank credit in this case is commercial bank credit consisting of Bank Mandiri, Bank BRI and Bank BPD Kalbar. Population of 415 MSME units that received credit assistance were then sampled as many as 75 respondents who needed at least one year of assistance. The regression used in explaining the effect of giving on the development of MSME businesses is needed through sales volume, labor force, total production and total assets. Lending by banks to MSMEs uses low interest earning productive credit schemes. The results of the study explain that lending influences business development significantly, which affects the sales volume of MSMEs, significantly influences the application of labor, significantly influences the amount of production, and significantly influences the amount of assets.

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh bantuan kredit perbankan terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) studi kasus di Kota Pontianak. Penelitian eksplanatori yang diarahkan untuk menguji hipotesis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pemberian kredit perbankan dalam hal ini adalah kredit bank umum yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BPD Kalbar. Populasi sebanyak 415 unit UMKM yang mendapat bantuan kredit kemudian diambil sampel sebanyak 75 responden yang telah memanfaatkan dana bantuan minimal sudah satu tahun berjalan. Regresi digunakan dalam menjelaskan pengaruh pemberian kredit terhadap perkembangan usaha UMKM yang diukur melalui volume penjualan, penyerapan tenaga kerja, jumlah produksi dan jumlah asset. Pemberian kredit oleh perbankan kepada UMKM menggunakan skim kredit produktif bunga rendah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemberian kredit mempengaruhi perkembangan usaha secara signifikan, yaitu mempengaruhi volume penjualan UMKM, secara signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, secara signifikan mempengaruhi jumlah produksi, dan secara signifikan mempengaruhi jumlah asset.

PENDAHULUAN

Keberadaan Lembaga keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Krisis membuktikan bahwa usaha kecil menengah yang jumlah sangat banyak mampu bertahan menghadapi krisis tersebut secara mandiri. Disaat perekonomian kini mulai menunjukkan geliat untuk bangkit kembali, usaha kecil menengah nampaknya seolah kembali terlupakan (Susilo dan Sutarta, 2004)

Upaya pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dewasa ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik pemerintah, perbankan, swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM yang perlu diefektifkan sebagai motor penggerak perekonomian nasional setelah mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan (Setyobudi, 2007)

Sejak krisis ekonomi, hampir semua skala usaha baik mikro, kecil, menengah maupun besar mengalami penurunan populasinya. Di antara ketiga skala usaha tersebut, UMKM yang lebih cepat pulih dibanding usaha skala besar. Pertumbuhan populasi UMKM rata-rata sebesar 4,82 persen per tahun periode 1998-2004, sedangkan usaha skala besar sebesar 4,6 persen pertahun pada periode yang sama (BI, 2015)

Kondisi tersebut menunjukkan, posisi UMKM di Indonesia sebenarnya sangat strategis dan dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional. Namun di sisi lain peran strategis UMKM secara makro tersebut pada kenyataannya belum selaras dengan kondisi pelaku UMKM itu sendiri. Dengan segala keterbatasannya baik keterbatasan permodalan, teknologi maupun aspek manajemennya menyebabkan di samping daya saing yang terbatas, kesejahteraan pelaku usaha kecil itu sendiri belum terjamin. Tahan menghadapi krisis namun dalam kondisi yang tidak sejahtera. Dalam era perdagangan bebas sekarang, di mana produk-produk pesaing impor membanjiri tanah air, tanpa peran dan bantuan pemerintah maupun pihak-pihak lain, UMKM akan semakin tertinggal jauh. UMKM membutuhkan peran pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja dan daya saing dengan upaya pemberdayaan yang berkelanjutan.

Bentuk bantuan pemerintah berupa pembiayaan atau kredit permodalan UMKM merupakan salah satu upaya dalam rangka penyebaran risiko lembaga keuangan dan perbankan, sementara suku bunga kredit UMKM sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup. Sektor ini mempunyai ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha besar karena kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga produk yang dihasilkan relatif rendah sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah (Syarief dan Etty, 2009). Namun demikian UMKM juga mempunyai karakteristik pembiayaan yang unik, yakni diperlukannya ketersediaan dana pada saat ini, jumlah dan sasaran yang tepat, prosedur yang relatif sederhana, adanya kemudahan akses ke sumber pembiayaan serta perlunya program pendampingan (*technical assistance*).

Dalam kenyataannya tidak mudah untuk memberdayakan UMKM di Indonesia, karena dalam pertumbuhannya sangat banyak menghadapi kendala dan keterbatasan baik internal maupun eksternal sehingga kurang mampu untuk berkembang. Menurut Rifa'i (2013), faktor internal yang menghambat perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal dan akses untuk mendapatkannya, kualitas SDM, lemahnya jaringan dan penetrasi pasar, mentalitas pengusaha dan kurangnya transparansi. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain

iklim usaha yang kurang kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana, pungutan liar, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, sifat produk, akses pasar terbatas dan terbatasnya akses informasi. Sejalan dengan pendapat Sasono (2001) yang menyatakan faktor internal yang menghambat perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal, SDM dan jenis produk, sedangkan faktor eksternalnya antara lain pengakuan yang terbatas, akses pasar, nilai tukar produk, pungutan liar dan krisis ekonomi.

Berdasar dua pendapat tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kendala yang paling banyak dihadapi UMKM adalah permodalan serta akses untuk mendapatkannya. Walaupun faktor modal sering dapat diatasi, misalnya dalam bentuk pinjaman antar kerabat atau teman, namun dalam tingkat persaingan dan ekspansi, permodalan sering menjadi penghambat utama. Ketika kondisi pasar menawarkan kesempatan atau peluang, dan kreativitas muncul, UMKM sering tidak mampu mengikuti kesempatan-kesempatan tersebut karena kendala modal. Di sisi lain kondisi UMKM biasanya tidak bankable, karakteristik UMKM yang bercirikan keterbatasan dalam administrasi keuangan menyebabkan kelompok usaha tersebut kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan. Menurut Syarif dan Etty (2009), kesulitan UMKM mengakses modal dari lembaga keuangan disebabkan karena ketidaksesuaian pendekatan pola dan prosedur lembaga perkreditan formal dengan karakteristik sebagian besar UMKM, khususnya usaha mikro. Padahal diketahui bahwa akses kemudahan perolehan modal sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Semakin mudah akses memperoleh modal baik itu dari pinjaman, investor, maupun bantuan pemerintah akan semakin memudahkan peluang perkembangan UMKM (Kristianingsih dan Trimardjono, 2014).

Bantuan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan dalam hal ini khususnya perbankan yaitu Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BPD Kalbar di Kota Pontianak yang mensyaratkan adanya agunan atau jaminan nasabah. Upaya memberikan bantuan dana kepada usaha masyarakat kecil adalah terkait dengan pengelolaan bantuan kredit itu sendiri harus dilakukan secara terbuka dan profesional. Pelaksanaan program dilapangan agar pemantauan lebih maksimal diupayakan memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat sebagai sarana pendampingan bagi UMKM.

Sebenarnya bagi lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah bisnis perbankan, proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor UKM lebih menguntungkan dibandingkan sektor non UKM. Sebab, sektor UKM memiliki ketahanan bisnis lebih kuat. Disamping itu faktor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan lembaga keuangan yaitu terkait dengan pembiayaan UKM yang saat sekarang ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan UKM tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri perbankan nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong perkembangan sektor.

Kebijakan pemerintah baik melalui nota kesepahaman dengan berbagai instansi yang kemudian dikenal dengan program KUR atau melalui peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 telah menunjukkan perhatian pemerintah untuk memberikan solusi kepada UMKM terkait dengan masalah permodalan dengan menjalankan peran lembaga pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM (BI, 2015)

Namun kenyataannya, program inipun tidak mudah dilaksanakan baik oleh UMKM maupun oleh lembaga keuangan Kota Pontianak. UMKM merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan terutama dalam hal pembukuan dan agunan. Demikian juga lembaga keuangan kesulitan menemukan UMKM yang feasible dan

bankable untuk dibiayai agar menghindari adanya kredit bermasalah pada waktu yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Lembaga pembiayaan adalah : badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Lembaga keuangan bank, sesuai UU No. 14 Tahun 1967, bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 2) Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan termasuk dalam Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB).
- 3) Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan; Kegiatan lembaga pembiayaan meliputi antara lain bidang usaha: a)sewa guna usaha; b)modal ventura; c)perdagangan surat berharga d)anjak piutang; e) usaha kartu kredit; f)pembiayaan konsumen.

UMKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar dapat diperoleh pengertian yang sesuai tentang UMKM, yakni menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi tersebut diantaranya :

- a. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
- b. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS)
BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.
- c. Bank Indonesia (BI)
UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:
 1. Modalnya kurang dari Rp. 20 juta.
 2. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta.
 3. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
 4. Omzet tahunan < Rp 1 miliar.
- d. Keppres No. 16/1994:
UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik itu disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2) Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar.

Dalam analisis makroekonomi pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai tingkat pertambahan dari pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Laju pertumbuhan PDB yang merupakan tingkat output diturunkan dari fungsi produksi suatu barang dan jasa. Fungsi produksi menurut Mankiw (2003) merupakan hubungan antara tingkat output (Y) dengan tingkat input (*capital and labour*).

Pemberdayaan UMKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistimatis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal (Gie Kian, 2003).

Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang memadai. Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini, relatif sulit menarik investasi dalam jumlah yang besar. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha mikro kecil dan menengah. Pemberdayaan UMKM diharapkan lebih mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia (Departemen Koperasi dan UKM, 2004)

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain adalah :

- H1 = pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan UMKM
- H2 = pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan tenaga kerja UMKM
- H3 = pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan berpengaruh signifikan terhadap produksi UMKM
- H4 = pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan berpengaruh signifikan terhadap asset usaha UMKM

METODA PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian eksplanatori yang merupakan deskripsi penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang ada (Suryabrata, 2011).

Penelitian menggunakan data primer berupa wawancara langsung pada UMKM yang menjadi nasabah Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BPD Kalbar. Data sekunder yang merupakan data diperoleh dari instansi terkait yang mendukung dalam perkembangan usaha

mikro di Kota Pontianak, data perkembangan atau rekaman rekapitulasi laporan instansi terkait seperti Koperasi, bank terkait dan UMKM di Kota Pontianak.

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Pontianak yang telah mendapat bantuan modal dari Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BPD Kalbar selama tahun 2018-2020 yang berjumlah 415 UMKM. Sampel diambil sebanyak 75 UMKM. Kriteria pengambilan sampel adalah peserta UMKM yang telah menggunakan/mengopersionalkan pembiayaan minimal satu tahun sehingga dapat dilihat perkembangan usahanya.

Variabel penelitian yang terdiri dari dua yaitu variabel dependen (variabel perkembangan usaha) dan variabel independen (kredit perbankan atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan). Perkembangan usaha dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen (terikat) diukur melalui perkembangan volume penjualan, penyerapan tenaga kerja, produksi dan jumlah asset. Defenisi operasional dari masing-masing ukuran perkembangan usaha tersebut adalah :

- 1) Volume penjualan adalah banyaknya hasil penjualan yang diperoleh UMKM yang diukur dalam bentuk nilai rupiah.
- 2) Tenaga kerja adalah banyaknya jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh UMKM dalam kegiatan produksi yang diukur dalam jumlah orang.
- 3) Jumlah produksi adalah banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan UMKM yang dikur dalam bentuk nilai rupiah.
- 4) Jumlah asset adalah modal dalam bentuk barang dan mesin, bangunan, tanah yang digunakan oleh UMKM untuk memperlancar proses usahanya yang diukur dalam bentuk nilai rupiah.

Untuk memenuhi tujuan penelitian serta menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi dengan formula sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X$$

Keterangan :

- Y = Perkembangan usaha
 β_0 = Konstanta
 β_1 = Koefisien regresi
 X = Kredit perbankan atau pembiayaan

Berdasarkan formula dan dikaitkan dengan perkembangan usaha, sehingga penelitian ini diukur melalui volume penjualan, jumlah tenaga kerja, produksi dan asset usaha, maka model matematis formulanya menjadi sebagai berikut :

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X, \text{ dimana } Y_1 \text{ adalah volume penjualan}$$

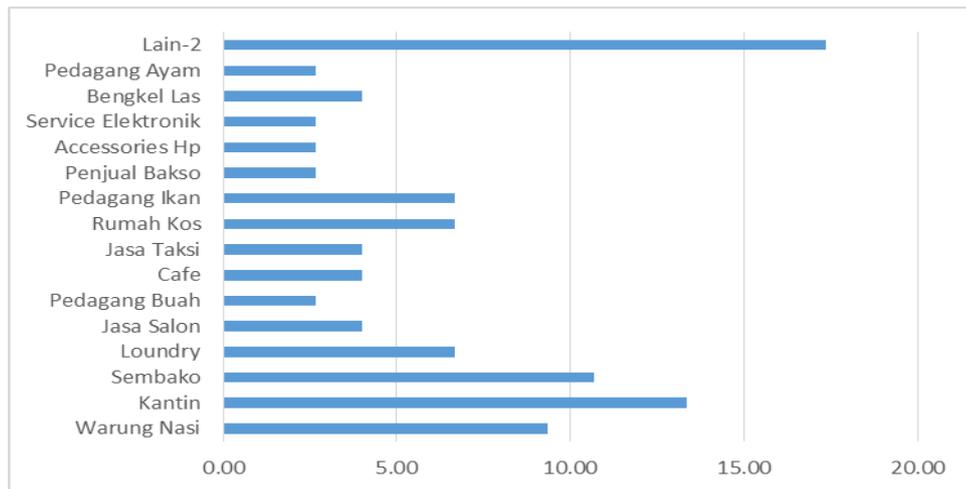
$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X, \text{ dimana } Y_2 \text{ adalah tenaga kerja}$$

$$Y_3 = \beta_0 + \beta_1 X, \text{ dimana } Y_3 \text{ adalah produksi}$$

$$Y_4 = \beta_0 + \beta_1 X, \text{ dimana } Y_4 \text{ adalah asset usaha}$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Determinansi pemberian kredit atau pembiayaan perbankan dan perkembangan UMKM berdasarkan data hasil wawancara, kemudian dengan bantuan SPSS dilakukan perhitungan sebagai berikut:



Gambar 1 Pembiayaan dan Jenis Usaha UMKM
 Sumber : Data Primer di olah

Berdasarkan Gambar 1 bahwa dominasi pembiayaan perbankan diberikan kepada jenis UMKM berupa usaha kantin sebanyak 13,33%, usaha sembako sebanyak 10,67%, usaha warung nasi sebanyak 9,33%. Dapat dikatakan bahwa jenis usaha tersebut memiliki tingkat feasible dan bankable menurut penilaian perbankan (Syarif dan ETTY, 2009).

Tabel 1 UMKM Berdasarkan Lama berusaha, Jangka waktu kredit dan Sewa tempat usaha

Tabel 1 UMKM Berdasarkan Lama berusaha, Jangka waktu kredit dan Sewa tempat usaha

	Keterangan	Rata-rata	Satuan
1	Lama berusaha	4,8	Tahun
2	Jangka wktu kredit	26,88	Bulan
3	Sewa tempat usaha	58,67	Persen

Sumber : Data primer di olah, Print out SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 1 bahwa rata-rata lama berusaha adalah 4,8 tahun. Lamanya seseorang pedagang menekuni usahanya maka akan meningkat pula penegetahuannya dan akan berpengaruh pada tingkat pendapatannya. Dengan kata lain, semakin lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usaha maka akan semakin meningkat pula pengetahuan mengenai perilaku konsumen dan perilaku pasar. Keterampilan berdagang semakin bertambah maka semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil dijaring (Susilo, 2010).

Rata-rata lama kredit adalah 26,88 bulan, merupakan kredit jangka menengah dan kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan pinjaman yang berguna untuk menambah modal awal dalam usaha. Biasanya pinjaman ini memiliki jangka selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Banyak juga bank di Indonesia yang memiliki program khusus untuk memberikan kesempatan bagi UKM mengembangkan usahanya lewat bantuan pinjaman modal.

Pemilihan lokasi tempat usaha yang strategis dengan menyewa sebanyak 58,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan lokasi yang strategis dan dekat dengan konsumen ataupun pasar akan mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu usaha merupakan pilihan yang dilakukan oleh usaha UMKM. Lokasi berhubungan dengan usaha harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya (Lupiyoadi dan Hamdani, 2009). Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek yang tentunya diarahkan untuk mendorong penjualan dan memberikan keuntungan bagi usaha.

Tabel 2 Koefisien Pembiayaan Terhadap Penjualan UMKM

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.124	.713		4.380	.000
Pembiayaan_X	.544	.099	.539	5.474	.000

a. Dependent Variable: Penjualan_Y₁

Sumber : Data primer di olah, Print out SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai t-hitung sebesar 5,474 dan nilai sig sebesar 0,000 dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan ($t_{hitung} > t_{tabel}$; $5,474 > 1,992$) atau ($\alpha > sig$; $0,05 > 0,000$) sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan level signifikan 95% secara statistik data mendukung hipotesa (menolak H_0 dan menerima H_a) yang menyatakan bahwa pembiayaan (X) oleh Lembaga keuangan secara signifikan mempengaruhi penjualan UMKM (Y₁). Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan responden bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan Kota Pontianak mendapat tanggapan positif dari UMKM. Pendanaan sangat membantu usaha UMKM dalam meningkatkan jumlah omzet penjualan. Alokasi pada penambahan modal kerja sehingga perputarannya semakin optimal karena tingkat modal yang cukup (Syarif dan Ety, 2009).

Tabel 3 Koefisien Pembiayaan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja UMKM

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8.782	1.587		-5.533	.000
Pembiayaan_X	1.611	.221	.649	7.286	.000

a. Dependent Variable: TenagaKerja_Y₂

Sumber : Data primer di olah, Print out SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai t-hitung sebesar 7,286 dan nilai sig sebesar 0,000 dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan ($t_{hitung} > t_{tabel}$; $7,286 > 1,992$) atau ($\alpha > sig$; $0,05 > 0,000$) sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan level signifikan 95% secara statistik data mendukung hipotesa (menolak H_0 dan menerima H_a) yang menyatakan bahwa pembiayaan (X) oleh Lembaga keuangan secara signifikan mempengaruhi penggunaan tenaga kerja UMKM (Y₂). Berdasarkan hasil observasi, responden menyatakan bahwa terjadi penambahan tenaga kerja apabila kegiatan usaha semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pembiayaan yang mereka terima. Pembiayaan mendorong usaha menjadi lebih agresif menimbulkan beban kerja baru sehingga memerlukan sejumlah tenaga kerja yang baru (Rifa'i, 2013). Alternatif lain apabila terjadi peningkatan kegiatan usaha adalah dengan memberikan beban kerja tambahan yang didukung oleh peningkatan upah kerja.

Tabel 4 Koefisien Pembiayaan Terhadap Produksi UMKM

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.939	.794		3.703	.000
Pembiayaan_X	.543	.111	.498	4.910	.000

a. Dependent Variable: Produksi_Y₃

Sumber : Data primer di olah, Print out SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,910 dan nilai sig sebesar 0,000 dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan ($t_{hitung} > t_{tabel}$; $4,910 > 1,992$) atau ($\alpha > sig$; $0,05 > 0,000$) sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan level signifikan 95% secara statistik data mendukung hipotesa (menolak H_0 dan menerima H_a) yang menyatakan bahwa pembiayaan (X) oleh Lembaga keuangan secara signifikan mempengaruhi produksi usaha UMKM (Y3). Sesuai pendapat Sarwono (2010) bahwa pembiayaan sangat membantu usaha UMKM dalam meningkatkan jumlah omzet penjualan yang berbanding lurus dengan penambahan produksi usaha. Penambahan produksi usaha akan terjadi apabila adanya alokasi modal kerja. Bantuan pendanaan oleh Lembaga keuangan memungkinkan penambahan modal kerja yang digunakan dalam usaha untuk memperoleh laba. Perputaran modal kerja yang optimal dapat meningkatkan porsi penjualan dan laba.

Tabel 5 Koefisien Pembiayaan Terhadap Asset UMKM

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.612	1.286		-1.253	.214
Pembiayaan_X	1.297	.179	.647	7.242	.000

a. Dependent Variable: Asset_Y4

Sumber : Data primer di olah, Print out SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai t-hitung sebesar 7,242 dan nilai sig sebesar 0,000 dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan ($t_{hitung} > t_{tabel}$; $7,242 > 1,992$) atau ($\alpha > sig$; $0,05 > 0,000$) sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan level signifikan 95% secara statistik data mendukung hipotesa (menolak H_0 dan menerima H_a) yang menyatakan bahwa pembiayaan (X) oleh Lembaga keuangan secara signifikan mempengaruhi asset usaha UMKM (Y4). Sesuai pendapat Sarwono (2010) bahwa pembiayaan sangat membantu usaha UMKM dalam meningkatkan jumlah asset yang berbanding lurus dengan penambahan asset usaha. Penambahan nilai produksi usaha dan peningkatan penjualan akan terjadi apabila adanya alokasi modal kerja. Bantuan pendanaan oleh Lembaga keuangan memungkinkan penambahan modal kerja yang digunakan dalam usaha untuk memperoleh laba. Perputaran modal kerja yang optimal dapat meningkatkan porsi penjualan dan laba yang akhirnya tertanam dalam asset usaha

SIMPULAN DAN SARAN

Pengaruh pembiayaan terhadap penjualan UMKM dengan garis regresi sebesar $Y1 = 3,124 + 0,544 X$ dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya pembiayaan oleh Lembaga keuangan maka akan semakin meningkatkan pula penjualan UMKM. Pengaruh pembiayaan terhadap tenaga kerja UMKM dengan garis regresi sebesar $Y2 = -8,782 + 1,611 X$ dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya pembiayaan oleh Lembaga keuangan maka akan semakin meningkatkan pula penggunaan tenaga kerja UMKM. Pengaruh pembiayaan terhadap produksi UMKM dengan garis regresi sebesar $Y3 = 2,939 + 0,543 X$ dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya pembiayaan oleh Lembaga keuangan maka akan semakin meningkatkan pula produksi UMKM. Pengaruh pembiayaan terhadap asset UMKM dengan garis regresi sebesar $Y4 = -1,612 + 1,297 X$ dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya pembiayaan oleh Lembaga keuangan maka akan semakin meningkatkan pula asset UMKM.

SARAN

Pembiayaan yang diberikan oleh beberapa Bank di Kota Pontianak tidak sepenuhnya menyalurkan KUR yang merupakan mandat dari pemerintah, melainkan menggunakan alokasi kredit produktif dengan bunga rendah. Sebaiknya seleksi pemberian kredit lebih dipermudah, atau pemberian pelatihan pencatatan keuangan bagi UMKM.

Sebaiknya perbankan harus tetap memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan jasa bunga yang rendah baik melalui KUR atau kredit produktif yang bisa terjangkau oleh UMKM, agar semakin banyak jumlah UMKM yang dapat menggunakan pembiayaan Bank dalam rangka mengembangkan usahanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak.

Tingkat pengembalian pembiayaan jangka pendek sehingga beban pokok yang ditanggung UMKM menjadi besar. Sebaiknya lebih dipikirkan lagi untuk memperpanjang lama kredit agar usaha UMKM menjadi lebih leluasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia., (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).
- Gie, Kwik Kian., (2003). Kebijakan Ekonomi Pemerintah RI : Tinjauan Etika Bisnis. Makalah Forum Munas Tarjih ke-26 PP Muhammadiyah di Padang
- Haryanto, Sugeng, (2011), https://www.researchgate.net/publication/301816180_potensi_dan_peran_lembaga_keuangan_mikro_lkm_dalam_upaya_pengembangan_usaha_kecil_dan_mikro, Diakses Desember 2020.
- Kristiningsih dan Trimarjono, Adrianto., 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha kecil menengah (Studi Kasus pada UKM di Wilayah Surabaya), The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014, *towards a new Indonesia business architecture*, sub tema: “*business and economic transformation towards AEC 2015*”, Fakultas Bisnis dan Pascasarjana UKWMS hal:141-154.
- Kuncoro, Mudradjad. (2002). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Lupiyoadi, R. & Hamdani, A., (2009), Manajemen Pemasaran Jasa, Edisi kedua. Jakarta:Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory . (2007). Teori Makro Ekonomi, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga
- Nuryadin, didi, dkk, (2010), Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional di Indonesia, <http://aldinosuprima.blog.uns.ac.id/Filles/2010/05/agglomerasi-dan-pertumbuhan-ekonomi-peran-karakteristik-regional-di-indonesia.pdf>, Akses 7 Oktober 2020.
- Rifa'i, Bachtiar., 2013. Efektivitas pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) krupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoharjo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, volume 1, Nomor 1, Januari 2013 Halaman 130-136.
- Sarwono, Aris Eddy, (2010), Peran Perbankan Dalam Mengembangkan Sektor Usaha Kecil-Mikro Yang Berwawasan Lingkungan, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 8, No. 1, April 2010 : 25 – 31
- Sasono, Adi., 2001. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Jakarta: Penerbit Center for Information and Development Studies (CIDES).
- Setyobudi, Andang., (2007), Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Halaman 29-35, Agustus 2007.

- Suryabrata, Sumadi., (2011), *Metodologi Penelitian*, Cetakan keenambelas, Universitas Gajah Mada, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Susilo, Sri Y. & Sutarta, A.E., (2004). Masalah dan Dinamika Industri Kecil Pasca Krisis Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1, hlm.65-78.
- Susilo, Sri Y., (2010), Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Profinsi DIY, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14, No. 3 September 2010: 467-478
- Syarief, Teuku dan Ety Budhiningsih., (2009). Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan Dalam Mendukung Permodalan UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Volume 4 – Agustus 2009: 62-87.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Wijono, Wiloejo Wirjo., (2005), *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus.
- Zain, H.M.Y., Fattah, S., Djauhariah, L., Siswadharna, B., Mustari, B., & Tadjibu, M.J. (2007). *Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan*. Diakses dari <http://www.smedec.com> pada tanggal 7 Oktober 2020.